



About the Journal

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik is published three times a year in April, August and December. This journal contains scientific articles on public administration science written in two languages: *Bahasa Indonesia* and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework. JIAP is published by Department of Public Administration Faculty of Administrative Science Brawijaya University Malang with ISSN 2302-2698 and online ISSN 2503-2887. Prior website address of this journal was <http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap>.

JIAP call for papers

 2016-01-28

JIAP invites scholars to submit manuscript related to public administrative science. [Read More](#) >

Current Issue

[ATOM](#) 1.0

[RSS](#) 2.0

[RSS](#) 1.0

[About JIAP](#)
[Aims and Scope](#)
[Editorial Team](#)
[Publication Ethics](#)
[Visitor Statistics](#)

Index

[Home](#) / [Editorial Team](#)

Editorial Team

Editor in chief

Asti Amelia Novita, Universitas Brawijaya, Indonesia

Editorial boards

Sumartono Sumartono, Department of Public Administration Faculty of Administrative Science Brawijaya University, Indonesia

Soesilo Zauhar, Department of Public Administration Faculty of Administrative Science Brawijaya University, Indonesia

M.R. Khoiril Muluk, Department of Public Administration Faculty of Administrative Science Brawijaya University, Indonesia

Lely Indah Mindarti, Department of Public Administration Faculty of Administrative Science Brawijaya University, Indonesia

Reviewers

Ahmad Martadha Mohamed, Profesor of public administration UUM College of Law, Government and International Studies Universiti Utara Malaysia, Malaysia

Samrit Yossomsakdi, Profesor of public policy Burapha University, Thailand

Bambang Supriyono, Professor of public administration Brawijaya University, Indonesia

Ginandjar Kartasasmita, Former head of national development planning agency of republic Indonesia, Indonesia

Mas'ud Said, Professor of government studies and expert at department of social services of republic Indonesia

Administration and technical editor

Indah Rachmawati, Indonesia

Current Issue

[ATOM 1.0](#)[RSS 2.0](#)[RSS 1.0](#)

About JIAP

[Aims and Scope](#)
[Editorial Team](#)
[Publication Ethics](#)
[Visitor Statistics](#)

Index

Tools

[Mendeley User Guide](#)
[Insert Citation using Mendeley](#)

Visitor Statistic

COUNTRY	VISITS
Indonesia	2,364
United States	162
Turkey	22
Malaysia	12
United Kingdo...	10

1-5 of 38 [NEXT >](#)

[Information for Author](#)
[Online Submissions](#)
[Author Guidelines](#)
[Download Author Guidelines](#)
[Plagiarism Policy](#)
[Download Template](#)

Information

[For Readers](#)
[For Authors](#)
[For Librarians](#)



[Home](#) / [Archives](#) / Vol. 1 No. 2 (2015): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik

Vol. 1 No. 2 (2015): Jurnal Ilmiah Administrasi Publik

Published: 2016-01-30

Articles

Desentralisasi, Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia

Sujarwoto Sujarwoto

1-6



Perspektif Teoritik Kekerasan dan Ancaman Kegagalan Pembangunan

Sukardi Sukardi

7-13



Foreign Aid and Economic Development in Indonesia

Media Wahyu Askar

14-18



Pentingnya Komitmen Penuh Organisasi dan Stakeholders dalam Mewujudkan Inovasi Publik

Trisno Sakti Herwanto

19-26



Kepatuhan Kelompok Sasaran sebagai Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan: Studi Kasus Implementasi PERDA Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Tutik Rachmawati

27-36



Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja Langsung - Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh

Heru Fahlevi, Muhammad Reza Ananta

37-44



Hubungan Prestasi Kerja Pembantu Rumah Tangga, Kepuasan Majikan, Kemampuan Negosiasi dan Kerentanan Migran Wanita Pembantu Rumah Tangga Indonesia di Negara Tujuan (Studi Kasus di Wilayah Lembah Klang Selangor Malaysia)

Lely Indah Mindarti

45-54



Pengaruh Kepuasan Mahasiswa terhadap Loyalitas: Studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya (UB)

Ainun Nikmah

55-58



Pengaruh Implementasi Internal Marketing Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Tenaga Kependidikan Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Zulfa Ikhsania

59-69



Current Issue



[About JIAP](#)
[Aims and Scope](#)
[Editorial Team](#)
[Publication Ethics](#)
[Visitor Statistics](#)

Index

Tools

[Mendeley User Guide](#)
[Insert Citation using Mendeley](#)

Visitor Statistic

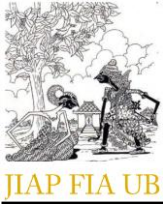
COUNTRY	VISITS
Indonesia	2,364
United States	162
Turkey	22
Malaysia	12
United Kingdo...	10

1-5 of 38 [NEXT >](#)

Information for Author
[Online Submissions](#)
[Author Guidelines](#)
[Download Author Guidelines](#)
[Plagiarism Policy](#)
[Download Template](#)

Information

[For Readers](#)
[For Authors](#)
[For Librarians](#)



Perspektif teoritik kekerasan dan ancaman kegagalan pembangunan

Sukardi. ^a*

^a Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 01 April 2015

Revisi pertama tanggal: 15 Mei 2015

Diterima tanggal: 15 Oktober 2015

Tersedia *online* tanggal 10 November 2015

Keywords: kekerasan, ancaman, pembangunan

ABSTRACT

Development violence has become characteristics of three government regims of Indonesia in the last three decades. Yet, the characteristics of violence still become the main ways for government to solve public issues. These characteristics of violence leads to violence action in the community. Through cultural perspective, this paper elaborates why and how systematic development violence was adopted become and the development policy implication to solve it.

INTISARI

Pengalaman selama tiga rejim pemerintahan Indonesia menjelaskan, bagaimana negara menerapkan *developmental violence*, masih saja menggunakan jalan kekerasan untuk merampungkan berbagai persoalan pembangunan yang ada. Kini reproduksi aksi kekerasan susulan muncul dari publik. Fenomena itu makin memperkuat tesis bahwa kekerasan pembangunan harus dihentikan. Tulisan ini menganalisis perspektif destinasi kultural mengapa kekerasan sistematis muncul dan apa implikasinya seraya mengemukakan bagaimana sebenarnya alternatif perwajahan pembangunan nirkekerasan di masa depan.

2015 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Setelah proses demokratisasi berhasil menggulingkan pemerintahan Orde Baru, tradisi kekerasan dalam proses pembangunan di Indonesia bukan lantas otomatis berhenti. Kini di berbagai arena pembangunan, masih dipertontonkan corak baru kekerasan yang menyelip dalam wajah yang lebih ramah dan samar. Fenomena kekerasan kini menjadi ikon sosial yang makin mengemuka di Indonesia. Kalau diperhatikan pola kekerasan mengikuti dua bentuk, yaitu kekerasan yang bersifat antar warga negara dalam status sosial yang horisontal, dan kekerasan antar kekuatan-kekuatan non negara melawan rakyat dalam

spektrum vertikal. Negara dapat dengan mudah menggunakan kekerasan untuk mempercepat implementasi kebijakan negara yang acapkali mendapat tentangan dari masyarakat. Negara juga dapat memobilisir institusi-institusi masyarakat yang berhasil ditaklukkan untuk ikut serta dalam barisannya, menggunakan cara-cara kekerasan menghadapi anasir-anasir sipil yang diberi stigma sebagai penentang rejim yang sah.

Pada sisi lain di tataran masyarakat fenomena kekerasan juga kerap kali tampil dalam warna dan corak yang tidak jauh berbeda. Perebutan resorsis yang makin langka dibawah tekanan ketidakberdayaan yang tidak

* Corresponding author. e-mail: sukardi@yahoo.com

tertanggungkan acapkali juga dapat memicu masyarakat untuk tidak segan-segan beradu menggunakan kekerasan antar sesamanya. Kolaborasi, aliansi antar warga masyarakat yang dibangun dengan tujuan untuk memenangkan arena persaingan sosial menjadi titik kulminasi dari konflik dan kekerasan yang terjadi dalam sebuah masyarakat.

Kebiasaan negara menggunakan kekerasan untuk menghadapi segala bentuk dan fenomena oposisi yang berkembang dalam sebuah rejim otoritarian nampaknya dilandaskan pada logika, bahwa negara harus steril dari kritik dan bebas dari kekeliruan. Dengan demikian setiap upaya yang mencoba menggugat supremasi kekuasaan negara dalam berbagai taraf diberi stigma negatif dan karenanya ada alasan untuk melenyapkannya.

Namun kini proses telah berubah, bahwa tuntutan dan gelombang demokratisasi yang berlangsung di berbagai negara pasca perang dunia II, telah memicu rejim otoritarian yang dimanjakan dengan berbagai corak kekerasan lambat laun mulai runtuh. Negara-negara otoriter sebagaimana diamati oleh Stephen Haggard dan Robert Kaufman (1995) maupun Robert A. Dahl (1998) telah memperkuat kecenderungan dunia, bahwa cepat atau lambat rejim otoriter di berbagai belahan dunia itu akan mengalami suatu fase delegitimasi dan kemudian lambat laun akan digantikan dengan tampilnya rejim demokrasi. Demokratisasi dan liberalisasi yang berlangsung secara meluas di berbagai kawasan dunia telah menjadi pemicu interupsi penggunaan kekerasan oleh militer di negara-negara otoritarian. Memang arah dari proses ini belum begitu memberikan sebuah harapan baru, karena realitasnya tidak sedikit negara di dunia yang melewati fase ini harus juga akhirnya tersorong dalam proses transisi dan krisis panjang yang melelahkan. Proses yang dialami pada akhirnya adalah lebih menyerupai jatuh bangun rejim untuk terlibat dalam sebuah pertengkaran internal yang laten dan tak dapat dielak.

Krisis ekonomi yang kemudian memicu krisis politik berlangsung sejak lengsernya presiden Soeharto tahun 1998 hingga kini adalah salah satu contoh titik balik kekerasan manajemen pembangunan. Stabilitas nasional yang dianggap menjadi prakondisi berlangsungnya pembangunan nasional ternyata berbiaya mahal, yaitu tertundanya proses demokratisasi, bahkan kekacauan yang tiada henti setelah proses demokratisasi sebuah negara. Kebijakan pemerintah menempatkan ekonomi sebagai panglima selama rejim Orde Baru, militer sebagai instrumen represif, birokrasi

sebagai mesin pembangunan telah melahirkan berbagai pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan makin menggumpalnya resistensi publik.

2. Teori

2.1 Akar kekerasan pembangunan

Praktek kekerasan birokrasi dalam proses penyelenggaraan negara di kawasan negara berkembang selama beberapa dekade ini telah menjadi pilihan utama. Menurut analisis Stephan Haggard dan Robert Kaufman (1995) sebagai akibat keinginan kebanyakan rejim negara berkembang untuk mempertahankan kondisi pareto stabilitas yang diperlukan untuk melangsungkan proses pembangunan. Kondisi demikian sangat diperlukan untuk memasuki fase-fase pembangunan tahapan berikut sehingga sebuah negara dapat terhindar dari instabilitas berkepanjangan. Pandangan ini menurut penulis ekonomi politik ini juga sebagai basis anjak, bahwa stabilitas yang diciptakannya pada akhirnya menafikan berbagai realitas yang berkembang di seputar dinamik proses demokratisasi yang berkembang sejak tahun 60-an di berbagai kawasan dunia.

Dengan realitas ini kebanyakan negara berkembang tak terkecuali Indonesia juga harus berhadapan dengan situasi sulit: keinginan mempertahankan pareto stabilitas yang memadai dengan realitas tuntutan proses demokratisasi di berbagai lapisan sosial masyarakat. Penggunaan kekerasan negara untuk mengendalikan berbagai gejolak dan proses gerakan demokratisasi pada akhirnya menimbulkan sebuah persoalan lanjutan yaitu situasi transisional yang ditandai dengan instabilitas yang meluas.

Fakta demikian di Indonesia merepresentasikan bentuknya dalam sebuah wahana gerakan-gerakan kontra negara yang kini oleh Cheryl Simrell King dan Camila Stivers (1998) disebutnya sebagai gerakan anti negara. Kekerasan yang semula dengan mudah dilakukan oleh aparat birokrasi negara kini membentuk spirral kekerasan lanjutan yaitu perlawanan dari rakyat terhadap negara. Persoalan ini banyak mengundang perdebatan di kalangan analis sebagaimana pernah dikemukakan oleh Dom Helder Camara (2000) dan Fukuyama (1999) bahwa kekerasan yang diproduksi oleh sebuah rejim negara secara terus menerus akan menghasilkan deposit kekerasan potensial baru. Kekerasan yang dilakukan oleh negara akan menjadi aset penting bagi kurban untuk berbuat serupa. Dan inilah yang kemudian disebut kontinum spirral kekerasan yang sulit dihentikan.

Situasi problematik demikian ini kini tengah melanda kehidupan negara kita. Sehingga kekerasan yang kini menebar di berbagai tempat dalam dua aras yaitu kekerasan vertikal, yang mencerminkan hubungan kekerasan dalam hirarki sosial dan kekerasan horisontal, yang mencerminkan hubungan sosial kesetaraan, keduanya menempati artikulasi yang sama seriusnya. Kenyataan demikian perlu mendapat perhatian lebih besar, karena tanpa usaha untuk menghentikannya maka bangunan dan konstruksi kita sebagai sebuah bangsa cepat atau lambat akan makin memburuk.

2.2 Teori kekerasan dan anarkhi dalam pembangunan

Meluasnya konflik horisontal diberbagai tanah air akhir-akhir ini sudah sampai tataran kritis dan mengkhawatirkan. Hal ini nyata sekali dengan semakin dekatnya model-model kekerasan yang menyelip seraya mendekati dinding isu-isu yang sangat sensitif, yaitu SARA. Antagonisme kekuatan sosial yang mengental dalam adonan SARA, acapkali bakal menyeret eksistensi sebuah pluralitas bangsa kedalam sentimen ras dan primordialisme yang pada gilirannya akan menimbulkan anti pluralisme, chauvinisme ethnisme dan rasisme radikal yang menetas konflik-konflik horisontal yang melelahkan dan tanpa arti apapun kecuali kehancuran bangsa.

Antagonisme politik yang berlangsung dalam masyarakat pada dasarnya mempunyai ruang psikologis yang positif, apabila ia berlangsung dalam sebuah diskursus wajar dan tanpa rekayasa. Tulisan singkat ini menganalisis mengapa antagonisme politik yang berbuntut konflik dan kekerasan di Indonesia di era reformasi hingga kini ini justru acapkali kurang dapat terkelola secara baik.

Setidaknya ada dua tipologi antagonisme dalam masyarakat kita saat ini: pertama antagonisme yang dilahirkan dalam proses perimbangan kekuatan-kekuatan politik potensial yang ada pada level bawah, dan kedua, antagonisme yang lahir dari proses rekayasa. Untuk antagonisme tipe pertama ini bisa kita lihat dari munculnya kekuatan arus bawah yang sangat besar misalnya dalam kasus menuntut mundurnya Pak Harto. Diteruskan oleh keinginan oleh sebagian besar rakyat untuk melakukan reformasi politik secara mendasar. Isu-isu yang dijadikan sandaran merupakan *common platform* yang secara psikologis memang menjadi kebutuhan publik luas. Sedangkan antagonisme kedua, ini lahir sebagai akibat munculnya arus balik dari kekuatan-kekuatan yang secara sengaja “mencipta dan

menebarkan” konflik-konflik berkepanjangan untuk suatu misi tertentu, yang bisa saja merupakan kekuatan kontra perubahan, pro status quo, atau bahkan justru kelompok-kelompok yang pro reformasi yang ingin memperoleh rente politik, sosial, ekonomi tertentu.

Meluasnya aksi demo disertai dengan kekerasan untuk menggulingkan lurah, bupati bahkan presiden beberapa waktu silam telah memberikan preseden bahwa modus gerakan sosial ini menjadi alat perjuangan politik yang cukup ampuh. Demikian halnya penyerobotan padang golf, pengambilalihan paksa tanah, pembabatan lahan perkebunan yang sampai sekarang berkepanjangan di beberapa daerah memperkuat tesis efektifitas gerakan sosial ini. Pada tahap awal pemerintah hanya memandang gerakan ini sebagai kejahatan sosial (*social banditism*), sebagai tindakan anarki yang harus dihadapi dan dibasmi. Setelah dihadap gerakan sosial ini bukannya malah mereda ternyata berbagai gejolak sejenis dalam takaran yang lebih besar meluas dan lebih mengeras. Respon pemerintah yang reaktif tersebut kini berubah menjadi *hopeless*, gerakan-gerakan kekesaran rakyat tersebut seolah dibiarkan dan ditoleransi.

Dalam kasus demikian, bentuk-bentuk kekerasan dan kegiatan anarki tersebut sebenarnya bukan sekadar kejahatan sosial tetapi lebih merupakan media ekspresi pemberontakan politik dari kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini telah mengalami tekanan kedigdayaan sistem, mereka telah menjadi kurban anarki eksploitasi dalam kurun waktu yang cukup panjang. Di beberapa tempat menggumpalnya kekesalan ini bahkan sudah melampaui batas-batas simbolik.

Radikalisme massa yang sangat solid menampilkan pesan sosial yang disuarakan menjadi tak dapat ditangkap secara wajar dan dewasa. Apresiasi sebagian besar aktor negara masih saja menyederhanakan. Gejolak massa dianggap sebagai bagian dari buah intimidasi dan usaha makar, tak konstitusional, didalangi oknum sebagai fenomena kebangkitan gerakan kiri dan PKI. Stigma demikian jelas bukan malah memberikan gambaran yang cukup jelas terhadap setiap persoalan, tetapi menjadi makin jauh dari memadai untuk menjelaskan secara lebih tepat tentang pikiran-pikiran, emosi sosial, nilai dan rasa keadilan yang nyata hidup dan diinginkan dalam tatanan dan takaran massa. Tindakan-tindakan demikian dalam rumpun sosiologi politik masuk dalam sebuah wacana anarki sosial yang sesungguhnya mempunyai akar sosial cukup tua. Perilaku komununal demikian

menurut analisis Dom Helder Camara adalah merupakan reproduksi dari kekerasan yang selama ini dengan enteng dilakukan negara terhadap rakyatnya.

Dalam Encyclopedia Britania, 1910 yang ditulis oleh Peter Kropotkin menyebutkan, anarkisme sebagai karya besar filosof Yunani bernama Zeno yang hidup pada 270 sebelum masehi. Salah satu konsep dasarnya adalah menciptakan sebuah tatanan masyarakat bebas tanpa pemerintah, sebagaimana dicita-citakan oleh Plato melalui negara utopia. Menurut konsep ini masyarakat luas pada dasarnya mempunyai naluri kearifan sangat kuat. Mereka mempunyai kebajikan-kebajikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dalam sebuah transaksi kontrak sosial dan tukar-menukar. Hadirnya negara di tengah masyarakat justru akan menindih masyarakat, mengintervensi, dan memonopoli hukum-hukum untuk kepentingan segelintir orang.

Teori klasik tentang kekerasan dan anarkisme dari pikiran filosof Zeno ini terus berkembang di negara-negara Eropa. Kita bisa menyaksikan pula sejarah lahirnya wacana anarkisme ini dari buku-buku Godwin yang telah melakukan analisisnya fenomena ini pada tahun 1756-1836, kemudian disusul oleh Lysander Spooner (1808-1887), Henry David Thoreau (1817-1860), Mikhail Bakunin (1814-1876) dan yang paling mutakhir di kalangan kaum sosialis adalah karya besar Peter Kropotkin (1842-1921) dan Noam Chomsky (1996). Anarkisme adalah merupakan bangunan sosial yang kreatif untuk membangun kekuatan yang berusaha membantu tumbuh kembangnya lembaga hukum bersama untuk melindungi rakyat dari perburuan dan kanibalisme kekuasaan kelompok minoritas.

Anarkisme merupakan pengembangan dari liberalisme atau sosialisme. Diantara prinsip-prinsip filosofi dasar anarkisme, kebebasan dan keadilan adalah tujuan akhir semua perjuangan politik. Sebagaimana paham-paham liberalisme, kaum anarki juga ingin kebebasan. Seperti kaum sosialis, kaum anarki juga menginginkan keadilan. Namun demikian kaum anarkis tak puas dengan liberalisme atau sosialisme. Kebebasan tanpa keadilan berarti si miskin dan si lemah akan lebih tertindas bila dibanding dengan si kaya dan si kuat, dan keadilan tanpa kebebasan telah menempatkan masyarakat luas menjadi kelas budak. Kebebasan dan keadilan bukan untuk dipertentangkan tapi saling melengkapi.

Ada stigma masyarakat yang lebih bebas cenderung kurang ada keadilan, dalam masyarakat yang lebih adil cenderung kurang ada kebebasan. Kaum

anarki mencatat bahwa manusia tak akan dapat memperoleh kebebasan tanpa keadilan atau sebaliknya. Bukan kebebasan sejati kalau sebagian besar masyarakat selalu saja atau terlalu miskin atau terlalu lemah untuk ikut hingar dalam kebebasan, dan bukan keadilan yang sejati kalau sebagian besar masyarakat diperintah oleh yang lain.

Anarkisme muncul sebagai respon untuk menentang liberalisme dan sosialisme, ketiganya pun mempunyai strategi pendekatan sejarah perjuangan yang sangat berbeda. Liberalisme memandang sejarah sebagai proses linier, perkembangan, pencerahan, toleransi dan emansipasi. Disana ada kemajuan dan kemunduran, kemajuan yang sesungguhnya adalah dari keadaan yang buruk menuju masa depan yang baik. Kaum sosialis menilai sejarah sebagai perkembangan proses dialektika dari kekejaman yang mewajahkan diri dalam kelaliman, feodalisme, dan kapitalisme. Dialektika bagi kaum sosialis adalah untuk memenangkan kaum proletar dan menghapuskan sistem kelas-kelas sosial. Diperlukan revolusi dan reaksi sehingga dicapai kemajuan martabat manusia yang sejati dari buruk menjadi lebih baik. Sedangkan kaum anarki memandang sejarah bukan sekadar proses linier dan perkembangan dialektika dalam satu arah, tetapi sebagai proses rangkap (dualistic process). Menurut kaum anarki sejarah manusia sebenarnya merupakan kisah perjuangan antara peraturan dan yang diatur, antara si kaya dan si miskin, antara rakyat yang ingin memerintah dan yang diperintah, antara otoritas dan kebebasan, pemerintah dan penentangannya, negara dan rakyatnya.

Ketegangan antar dua kutub tersebut tidak akan pernah dapat diputuskan. Oleh karena itu tak jarang negara justru menjadi inkubator kejahatan, yang memberikan suhu dan iklim untuk menetas kan kejahatan lewat contoh-contoh represif yang dipertontonkan ketika memplementasikan sebuah kebijakan negara melalui alat-alat negaranya (Bakunin, 1876). Karena itu Peter Kropotkin (1887) menyebutkan adalah sebuah kebodohan untuk memilih segelintir orang dan lantas meyakini untuk membuat hukum untuk mengatur sebagian besar khalayak manusia.

3. Metode Penelitian

Paper ini menggunakan telaah pustaka untuk menelaah fenomena kekerasan dalam pembangunan dan pembangunan berwajah kekerasan di Indonesia. *Content analysis* atau analisis isi digunakan untuk menjelaskan munculnya kekerasan dalam pembangunan

dan pembangunan berwajah kekerasan yang terjadi di Indonesia.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kekerasan dalam proses pembangunan menurut Sorensen sebagaimana dikutip Lambang Trijono adalah merupakan dua ikon kontradiktif. Pembangunan disatu sisi adalah merupakan proses menuju sesuatu keadaan yang lebih baik sementara kekerasan adalah sesuatu keadaan yang bakal menghambat proses pembangunan itu sendiri. Munculnya konsepsi kekerasan pembangunan (*developmental violence*), masih menurut analisis Lambang Trijono, adalah bermula dari pemikiran Hettne yang menganalisis bahwa pembangunan dalam mainstream kapitalis dan sosialis cenderung untuk melayani kepentingan kelompok berkuasa daripada rakyat kebanyakan. Oleh karena itu, proses pembangunan harus dipelihara dan dirawat dan dipelihara melalui kekuatan militer atau dalam bentuknya yang lebih moderat adalah dengan kekerasan. Kenyataan itu diperlukan untuk mempertahankan surplus kekuatan sehingga rente ekonomi dapat dipertahankan, dan ini berarti menciptakan struktur yang lebih koersif. Dalam kondisi demikian pertentangan, kontradiksi dan konflik adalah sesuatu yang sulit sekali dielak pada rejim pembangunan sosialis dan kapitalis.

Rejim pembangunan di Indonesia lebih akrab menggunakan idiom kekerasan ini seraya menyembunyikan dalam jargon keamanan negara. Doktrin demikian kebanyakan diterapkan di berbagai negara otoriter. Doktrin demikian menurut ELSAM (1999) diterapkan untuk membatasi pelaksanaan HAM dan kebebasan dasarnya atas nama berbagai kepentingan. Di sejumlah negara Asia hal ini juga dipakai untuk alasan "demi pembangunan". Namun demikian, sebenarnya adalah upaya untuk membetengi penguasa dari berbagai kritik, oposisi serta kontrol dari kekuatan rakyat. Kebiasaan rejim pemerintahan memanager pembangunan negara dengan cara demikian ini akhirnya juga melahirkan kadar dan gaya kekerasan yang berbeda. Kekerasan negara dilakukan dengan cara menyelinap dengan apa yang disebut oleh ELSAM untuk kepentingan negara (Elsam, 1999).

Perilaku kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan sistem birokrasi secara sistematis juga sebagai cermin bahwa kekerasan yang berlangsung dalam sebuah sistem negara menggunakan instrumen-instrumen yang dimobilisasi negara. Dalam proses produksi hukum, misalnya acapkali dijadikan untuk menjerat kelompok-

kelompok yang berseberangan dengan negara. Aparat birokrasi yang ada di bawahnya pun acapkali juga menjadi instrumen hukum penindasan yang secara represif sah-sah saja melakukan pelanggaran kemanusiaan kepada rakyatnya. Misalnya dalam hal penetapan UU subversi yang dimasa silam dijadikan referensi utama menjerat aktor-aktor para negara yang melawan. Disamping UU subversi tersebut di negara kita juga tersedia "*gudang*" yang menyimpan deposit pengabsahan kekerasan terhadap rakyatnya yaitu dalam KUHAP. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, KUHAP itu selain untuk melindungi kepentingan warga negaranya ternyata juga digunakan oleh negara sebagai payung dalam melakukan kekerasan kepada warga negaranya (Elsam, 1999:33).

Sementara itu menurut Denny B. C. Hariandja (1999: 95-97), diantara akar sejarah mengapa ada kecenderungan birokrasi Indonesia juga menjadi instrumen kejahatan negara adalah lahir dari rahim *patrimonialisme*. Birokrasi negara dengan warna demikian menurut Denny, ditandai dengan hubungan vertikal yang lebih kuat sehingga mengabaikan mandat horizontalnya. Mandat yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik dalam mainstream kesetaraan. Hal ini ini juga berhasil diilustrasikan secara komprehensif oleh Deny dengan kenyataan bahwa birokrasi kita dihindangi penyakit "*pongah*" dan tidak mau mampu memegang prinsip-prinsip akuntabilitas publik yang baik.

Kendatipun dari perspektif positivis kekerasan birokrasi dalam proses pembangunan dapat memberikan revenue ekonomi dan politik yang menguntungkan tetapi dalam jangka panjang nampaknya justru kontra produktif. Kekerasan yang dilakukan oleh negara atau birokrasi dalam tenggat waktu yang panjang memberikan luka yang mendalam di wilayah memori kolektif publik. Luka demikian inilah yang oleh Dom Helder Camara disebutkan sebagai bentuk reproduksi kekerasan baru, kekerasan akan dibalas kekerasan yang lebih keras. Karena itu kekerasan negara dalam melangsungkan proses pembangunan sebenarnya adalah sebuah paradoks. Disatu sisi pembangunan ingin menjamin hak-hak dasar manusia yaitu hak ekonomi politik dan hak-hak sosial lainnya namun di pihak lain untuk mewujudkan itu harus dilakukan dengan mengandalkan kekerasan sistematis. Implikasi selanjutnya, apabila cara-cara kekerasan selalu dipergunakan dalam proses pembangunan maka itu dapat menjadi preseden bahwa apapun dapat dilakukan demi pembangunan. Hal

demikian tentu tidak bakal memberikan kontribusi pada kesinambungan pembangunan itu sendiri, karena pada akhirnya cepat atau lambat akan menumbuhkan bulir-bulir kebencian yang luas rakyat terhadap apa yang disebut dengan pembangunan. Pembangunan selalu digambarkan dengan sosoknya yang suka menindas, suka menggusur, suka membungkam dan suka membunuh tanpa alasan.

Implikasi berikutnya, bahwa pembenaran kekerasan dalam pembangunan akan mempersulit proses penciptaan keadilan sosial. Hal ini disebabkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh rejim pemerintahan cenderung akan diperuntukkan pada segolongan ekonomi kuat dan itu akan mempercepat proses akumulasi resorsis ekonomi, politik kepada sekelompok orang. Fakta yang oligarkis demikian akan mempersulit upaya-upaya dan cita-cita keadilan sosial. Kelambanan pemerintah dalam merespon berbagai ketimpangan dan kekerasan dalam pembangunan nampaknya bukan sekadar dualisme watak pembangunan yang berlangsung tetapi juga sebagai cermin pemihakan yang salah dalam praktek pembangunan di Indonesia. Pemihakan kepada kekuatan-kekuatan kapital dan pasar yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya aktor yang dapat membebaskan ketertinggalan bangsa ini dari proses modernisasi yang berlangsung. Kenyataan bahwa pemerintah selama ini telah melakukan apapun demi memajukan kapital dan kekuatan pasar yang sangat luar biasa mewarnai corak dan karakter interaksi dalam sistem pembangunan negara kita. Inilah yang memperkuat pendapat Heru Nugroho (2001:vi), bahwa pembangunan Indonesia yang menekankan peran kekuatan neo-liberal akan dalam konteks Indonesia akan mendatangkan persoalan besar, antara lain ketimpangan, dan menyehadapkan rakyat dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia yang tak tertandingi.

Dari bagian ini dapat dijelaskan bahwa implikasi sosial, ekonomi dan politik dari praktek kekerasan ini sebenarnya adalah berlangsungnya penindasan negara atas rakyatnya. Penindasan yang dilakukan untuk sebagai lisensi yang harus diberikan agar kekuatan-kekuatan ekonomi korporatis itu dapat dengan leluasa berkibrah di negeri ini dengan imbalan negara memperoleh rente pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan

Orientasi metode dan proses pembangunan harus didemistifikasikan dari sebuah perspektif baru, yaitu pembangunan sebagai usaha untuk menjamin perdamaian dan pembebasan manusia dari rasa takut

dan intimidasi. Dengan demikian konsepsi pembangunan yang telah ada sekarang ini harus direformulasikan kembali dengan menempatkan perdamaian dan penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan sebagai harga tertinggi dari pembangunan yang tidak boleh ditukar dengan apapun. Pengingkaran terhadap fakta ini akan menyebabkan proses pembangunan yang telah berlangsung diinterupsi oleh rayat. Dan apabila peristiwa ini terjadi maka deretan prestasi pembangunan yang telah ada tidak akan berarti, karena akan menimbulkan komplikasi baru yaitu kerusuhan sosial yang memporak porandakannya. Kekerasan yang dilakukan oleh rakyat dan kini menebar dimanna-mana harus segera dihentikan dengan cara merubah watak dan sifat pembangunan dari yang semula berorientasi pada pertumbuhan kearah praktek orientasi kemanusiaan yang hakiki, yaitu menempatkan hak-hak kebebasan dasar dan kemanusiaan sebagai nilai dasar tertinggi. Hal demikian mensyaratkan bahwa pembangunan harus melihat keragaman dan berbagai elemen dasar potensial yang bervariasi. Hukum tertinggi pembangunan adalah kemanusiaan dan kesejahteraan yang secara langsung dan nyata dapat menjangkau rakyat.

Developmental violence dengan aktor utama birokrasi adalah sebuah kejahatan pembangunan dan harus dihentikan dari mainstream pembangunan yang kini dilangsungkan. Pemihakan birokrasi pada nilai dasar perdamaian dilakukan dengan praktek pembangunan nirkekerasan.

Daftar Pustaka

- Andriono, R., (1999), Penjarahan kepemilikan rakyat oleh negara, makalah dalam seminar dan peluncuran buku, *Pembangunan tanpa perasaan :Evaluasi pemenuhan hak ekonomi sosial budaya Orde Baru* oleh IDEA dan ELSAM di Yogyakarta, 5-6 April 1999.
- Camara, H, (2000), *Spiral of violence* (terj.) Komunitas APIRU, Spiral Kekerasan, INSIST Press, Yogyakarta.
- Dahl, RA. (1998), *On democracy*, Yale University Press.
- Fukuyama, F, (1999), *The great disruption:Human nature and the reconstitution of social order*, The Free Press, New York.
- Haggard, S. dan Kaufman, R. (1995), *The political economy of democratic transition*, Princeton University Press, New Jersey.

- Hariandja, D., (1999), *Birokrasi nan pongah : Belajar dari kegagalan Orde Baru*, Kanisius, Yogyakarta.
- Haryanto, I, (1999), *Kejahatan negara : Telaah penerapan delik keamanan negara*, Elsam, Jakarta.
- Jhamtani, H, (2000), Perjalanan kesepakatan perdagangan dunia: Alat globalisasi untuk menundukkan dunia ketiga, *Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, Edisi 5 tahun II 2000.
- King, CS & Stivers, C., (1998), *Government is us : Public administration in an anti government era*, Sage Publication, London.
- Nugroho, H, (2001), *Negara, pasar dan keadilan sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Snyder, J., (2000), *From voting to violence: Democraization and nationalist conflict*, WW Norton & Company, New York
- Staub, E., (1996), *Cultural-societal roots of violence: The examples of genocidal violence of contemporary youth violence in United States*, dalam *American Psychologist*, February, 1996 pp. 118-123.
- Trijono, L, (1999), Refleksi tentang kekerasan dalam Pembangunan, *Jurnal Sosial Politik*, 2(3):26-28.